

Geopolitik Pangan Indonesia: Ketahanan Nasional di Tengah Disrupsi Perdagangan Global



Oleh: Rudy C Tarumingkeng

Rudy C Tarumingkeng: Geopolitik Pangan Indonesia - Ketahanan Nasional di Tengah Disrupsi Perdagangan Global

By:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan
Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari)

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyct75@gmail.com

14 Maret 2026

GEOPOLITIK PANGAN INDONESIA: KETAHANAN NASIONAL DI TENGAH DISRUPSI PERDAGANGAN GLOBAL

1. Pendahuluan

Pangan selalu menjadi isu ekonomi, tetapi dalam beberapa tahun terakhir ia kembali tampil sebagai isu geopolitik inti. Dunia tidak lagi menghadapi pasar pangan global yang dapat diasumsikan selalu lancar, murah, dan netral. Perang, sanksi, gangguan pelayaran, volatilitas energi, pembatasan ekspor, cuaca ekstrem, dan kompetisi atas pupuk serta logistik telah mengubah pangan dari sekadar komoditas menjadi instrumen kekuatan dan sekaligus sumber kerentanan. Bank Dunia dalam *Food Security Update* Desember 2025 mencatat bahwa, meskipun pasar global relatif “well supplied” untuk beberapa komoditas utama, penggunaan kebijakan pembatasan ekspor tetap menjadi faktor risiko yang signifikan; per Desember 2025, **17 negara** masih menerapkan **27 langkah pembatasan ekspor** pangan. WTO juga menegaskan bahwa pembatasan ekspor pangan memperburuk volatilitas harga dan memperdalam kerawanan pangan.

Bagi Indonesia, perubahan ini sangat penting karena ketahanan pangan nasional tidak hanya ditentukan oleh luas panen atau stok beras di gudang, tetapi juga oleh dinamika perdagangan dunia, harga energi, biaya pupuk, iklim, dan kemampuan negara mengelola distribusi serta stabilisasi harga. Dalam praktiknya, Indonesia berada dalam posisi yang

paradoks: negara ini memiliki basis agraria besar, produksi beras 2025 meningkat tajam, dan stok pemerintah pada 2025 sempat mendekati **4 juta ton**, tetapi harga beras tetap dapat melonjak dan akses konsumen tetap terganggu. Reuters pada September 2025 bahkan menyoroti bahwa harga beras masih mengguncang konsumen meskipun panen membaik dan stok Bulog tinggi, yang menunjukkan bahwa masalah pangan bukan semata soal volume produksi, melainkan juga kualitas tata kelola dan distribusi. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Karena itu, pembahasan tentang geopolitik pangan Indonesia tidak cukup bila dibatasi pada target swasembada atau impor semata. Yang perlu dibaca adalah hubungan antara **ketahanan nasional, disrupsi perdagangan global**, dan **arsitektur kebijakan domestik**. Esai ini berargumen bahwa tantangan pangan Indonesia hari ini terletak pada tiga hal sekaligus: pertama, Indonesia harus memperkuat kapasitas produksi dan distribusi domestik; kedua, Indonesia harus mengurangi kerentanan terhadap guncangan eksternal seperti pembatasan ekspor, lonjakan pupuk, dan krisis pelayaran; ketiga, Indonesia harus menata ulang kebijakan pangan agar tidak terlalu berpusat pada respons jangka pendek, tetapi lebih tahan terhadap disrupsi sistemik.

2. Mengapa Pangan Kembali Menjadi Isu Geopolitik?

Pada masa globalisasi puncak, ada kecenderungan melihat pangan sebagai bagian dari logika efisiensi pasar: negara dapat mengimpor bila kurang, mengekspor bila berlebih, dan pasar global akan menyeimbangkan kekurangan lokal. Pandangan ini makin sulit dipertahankan. Bank Dunia pada Februari 2025 mencatat bahwa setelah pandemi dan perang Rusia–Ukraina, negara-negara terus memakai kebijakan dagang untuk menanggapi ancaman kekurangan domestik; pada saat itu masih ada **17 negara** yang menerapkan **22 larangan ekspor pangan** dan **8 negara** yang menerapkan **12 pembatasan ekspor lain**. Pada Desember 2025, bentuk pembatasan itu memang

lebih sering berupa kuota, pajak ekspor, dan lisensi daripada larangan total, tetapi risikonya bagi kestabilan harga global tetap besar.

Di titik ini, pangan menjadi geopolitik bukan hanya karena orang harus makan, tetapi karena akses terhadap pangan kini dipengaruhi oleh siapa yang menguasai jalur perdagangan, siapa yang menahan ekspor, siapa yang memiliki keunggulan logistik, dan siapa yang bisa membayar input yang makin mahal. IFPRI pada Maret 2026 menegaskan bahwa konflik yang berkepanjangan di sekitar Teluk Persia dapat mencekik perdagangan laut global dari kawasan itu, menaikkan harga energi dan pupuk, serta pada akhirnya memengaruhi produksi dan harga pangan di banyak negara. Ini menunjukkan bahwa bahkan negara yang tidak sedang berperang pun dapat mengalami tekanan pangan akibat konflik yang berlangsung jauh dari wilayahnya. (IFPRI)

Bagi Indonesia, implikasinya jelas. Sebagai negara kepulauan besar yang tetap terhubung kuat ke perdagangan dunia, Indonesia tidak bisa memisahkan kebijakan pangan dari geopolitik energi, pelayaran, dan perdagangan. Jika harga minyak melonjak, ongkos distribusi dan subsidi ikut tertekan. Jika pupuk dunia naik, biaya produksi petani membengkak. Jika beberapa eksportir membatasi pasokan, negara pengimpor akan berebut stok di pasar internasional. Karena itu, ketahanan pangan nasional pada abad ke-21 bukan hanya soal sawah dan irigasi, tetapi juga soal kemampuan bertahan dalam sistem global yang semakin rapuh. (IFPRI)

3. Ketahanan Pangan Indonesia: Dari Swasembada ke Kedaulatan Pangan

Dalam wacana kebijakan Indonesia, pangan telah lama dikaitkan dengan swasembada. Namun dalam perkembangan terakhir, narasinya semakin bergeser ke bahasa **kedaulatan** dan **ketahanan nasional**. FAO dalam *Agrifood Policy Highlights September 2025* menyebut Indonesia sebagai negara yang membuat komitmen fiskal paling besar pada periode Juli–

Agustus 2025, dengan **anggaran ketahanan pangan 2026 sekitar USD 10,1 miliar**, yang dibingkai pemerintah sebagai persoalan “national sovereignty.” FAO juga mencatat bahwa strategi ini memadukan larangan impor sementara untuk melindungi petani beras, penguatan program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), serta subsidi penuh untuk wilayah berbiaya tinggi seperti Papua. ([FAOHome](#))

Bahasa “kedaulatan pangan” ini penting karena memperlihatkan bahwa pemerintah Indonesia tidak lagi melihat pangan semata sebagai urusan pasar, melainkan sebagai bagian dari legitimasi negara. Dalam praktiknya, hal itu diterjemahkan ke dalam tiga instrumen utama. Pertama, penguatan produksi domestik. Kedua, penguatan pengadaan dan cadangan pemerintah melalui Bulog. Ketiga, intervensi harga dan distribusi melalui SPHP dan kebijakan terkait. Reuters pada Januari 2025 melaporkan bahwa Bulog menaikkan target pengadaan beras domestik menjadi **3 juta ton**, lebih dari dua kali realisasi **1,27 juta ton** pada 2024, setelah Indonesia mengimpor lebih dari **3,7 juta ton** beras pada 2024. Pada saat yang sama, pemerintah menaikkan harga pembelian gabah menjadi **Rp6.500/kg** untuk mendukung penyerapan domestik. ([Reuters](#))

Pendekatan ini secara politik mudah dipahami. Negara ingin menurunkan ketergantungan pada impor, mendukung petani lokal, dan memastikan cadangan beras pemerintah cukup besar untuk menahan gejolak. Namun secara geopolitik, pendekatan ini juga menunjukkan bahwa Indonesia sedang mencoba mengurangi salah satu sumber kerentanannya: ketergantungan pada pasar luar pada saat pasar luar sendiri semakin sering dibatasi. Dalam bahasa yang lebih tegas, Indonesia tampaknya ingin bergerak dari logika “import when needed” menuju logika “buffer first, import later if unavoidable.”

4. Perkembangan Produksi dan Stok: Perbaikan yang Nyata

Data 2025 memperlihatkan perbaikan produksi yang nyata. BPS pada 2 Februari 2026 melaporkan bahwa luas panen padi Indonesia pada 2025

mencapai sekitar **11,32 juta hektare**, dengan produksi padi **60,21 juta ton GKG** dan produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk **34,69 juta ton**, naik **13,29 persen** dari 2024. Secara bulanan pun, banyak rilis BPS sepanjang 2025 menunjukkan produksi yang membaik; misalnya pada Agustus 2025 produksi beras diperkirakan **3,24 juta ton**, naik **9,81 persen** dari Agustus 2024. Data ini menegaskan bahwa dari sisi produksi primer, 2025 adalah tahun yang jauh lebih baik dibandingkan 2024. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Perbaikan itu sejalan dengan narasi pemerintah bahwa 2025 dapat menjadi titik balik menuju pengurangan impor. Reuters pada Januari 2025 melaporkan bahwa estimasi produksi beras 2025 saat itu berada di sekitar **32,8 juta ton**, naik dari **30,34 juta ton** pada 2024, dan pemerintah menyatakan tidak akan mengimpor beras lagi pada 2025. Menjelang akhir tahun, Reuters pada September 2025 mencatat bahwa Indonesia memang berhasil tidak mengimpor beras selama 2025 setelah mengimpor **4,52 juta ton** pada tahun sebelumnya. Dalam kerangka kebijakan, ini merupakan capaian penting: Indonesia mampu bergerak dari posisi importir besar pada 2024 menuju penghentian impor beras konsumsi pada 2025. ([Reuters](#))

Stok pemerintah pun meningkat tajam. Reuters melaporkan bahwa per **8 September 2025**, stok Bulog mencapai hampir **4 juta ton**, hampir dua kali lipat dibanding akhir 2024. Stok sebesar ini memberi negara ruang intervensi yang besar, baik untuk stabilisasi harga, operasi pasar, maupun pengamanan pasokan bagi daerah rentan. Secara geopolitik, cadangan seperti ini sangat penting, karena ketika pasar global tidak stabil, negara yang punya buffer domestik lebih besar akan lebih tenang dibanding negara yang harus masuk pasar internasional saat semua orang berebut. ([Reuters](#))

5. Tetapi Mengapa Harga Tetap Bergejolak?

Di sinilah problem pokok ketahanan pangan Indonesia menjadi terlihat. Produksi membaik, stok meningkat, impor berhenti—namun harga beras tetap bisa tinggi. Reuters pada September 2025 menggambarkan situasi ini secara tajam: harga beras tetap mengguncang konsumen meskipun panen baik dan stok Bulog besar. Reuters menjelaskan bahwa setelah pemerintah menaikkan harga pembelian gabah dan memperluas kriterianya pada Maret 2025, Bulog akhirnya membeli banyak beras berkualitas lebih rendah. Menurut Ombudsman dan pelaku usaha yang dikutip Reuters, persoalan utama bukan kekurangan stok, melainkan **“suboptimal rice management”**—manajemen cadangan dan distribusi yang belum optimal. ([Reuters](#))

Kasus ini penting secara analitis. Ia menunjukkan bahwa ketahanan pangan tidak identik dengan kuantitas stok. Stok besar memang memberi rasa aman makro, tetapi tidak otomatis menjamin harga eceran stabil atau kualitas yang tersedia di pasar sesuai harapan konsumen. Bila pengadaan terlalu fokus pada volume tanpa menjaga mutu, atau distribusi cadangan ke pasar terlambat, maka harga tetap bisa naik dan persepsi kelangkaan tetap muncul. Ini menjelaskan mengapa negara yang sukses secara produksi masih bisa tampak gagal di mata publik bila stabilisasi pasar tidak berjalan cepat dan presisi. ([Reuters](#))

Data inflasi BPS mendukung pembacaan ini. Pada Desember 2025, BPS mencatat kelompok **makanan, minuman, dan tembakau** mengalami inflasi tahunan **4,58 persen** dan memberikan andil **1,33 poin** pada inflasi nasional. Pada September 2025, BPS juga menyatakan beras masih memberi andil inflasi dengan kenaikan harga beras **0,73 persen month-to-month**, setelah pada Juli kenaikannya bahkan mencapai **1,35 persen**. Dengan kata lain, tekanan pangan—dan beras khususnya—tetap menjadi variabel inflasi yang nyata meskipun negara sedang berada dalam fase penguatan stok. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

BPS bahkan pada Januari 2025 mencatat harga beras premium di penggilingan naik **0,82 persen** menjadi rata-rata **Rp13.112/kg**, sedangkan beras medium naik **1,29 persen**. Ini menunjukkan bahwa fluktuasi harga berlangsung sepanjang rantai, tidak hanya pada tingkat eceran. Maka, jika hendak membaca geopolitik pangan Indonesia secara tepat, kita harus mengakui bahwa ancaman tidak hanya datang dari luar negeri, tetapi juga dari kelemahan integrasi antara produksi, pengadaan, logistik, kualitas, dan distribusi domestik. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

6. Disrupsi Perdagangan Global: Mengapa Tetap Berbahaya bagi Indonesia?

Sekalipun Indonesia pada 2025 berhasil tidak mengimpor beras konsumsi, negara ini tetap tidak kebal terhadap disrupsi perdagangan global. Ada tiga alasan utama. Pertama, Indonesia tetap hidup dalam sistem harga global. Jika konflik menaikkan energi dan pupuk, biaya produksi serta distribusi domestik akan terdorong naik. Kedua, Indonesia masih mengimpor beberapa komoditas pangan, bahan baku, dan input pertanian lain, termasuk gandum serta berbagai kebutuhan pakan dan industri pangan. Ketiga, pasar global memengaruhi insentif petani, pedagang, dan pembuat kebijakan, terutama ketika harga internasional bergerak tajam. ([IFPRI](#))

Bank Dunia pada Desember 2025 memang mencatat bahwa pasar global "well supplied" untuk beberapa komoditas, dengan harga beras dan gandum yang cenderung menurun dan biaya pupuk yang sedikit mereda. Namun Bank Dunia pada saat yang sama memperingatkan bahwa pembatasan ekspor tetap menjadi faktor risiko yang signifikan. Artinya, ketersediaan global tidak otomatis berarti keterjangkauan dan kelancaran akses, karena kebijakan negara-negara eksportir dapat berubah sangat cepat ketika mereka merasa terancam secara domestik. Inilah inti geopolitik pangan global: pasar tidak bekerja dalam ruang

netral, tetapi di bawah bayang-bayang keputusan politik negara. ([World Bank](#))

WTO juga mengingatkan bahwa pembatasan ekspor pangan memperburuk volatilitas harga. Sepanjang 2025, forum pertanian WTO terus membahas dampak pembatasan ekspor terhadap food price stability dan food insecurity. Secara praktis, ini berarti negara seperti Indonesia tidak boleh hanya membaca harga dunia hari ini, tetapi juga harus memperhitungkan kemungkinan bahwa pasokan global bisa menyusut tiba-tiba akibat kebijakan proteksi pangan di negara lain. Ketika itu terjadi, negara yang terlalu bergantung pada pasar spot internasional akan berada dalam posisi lemah. ([World Trade Organization](#))

7. Pupuk, Energi, dan Jalur Laut: Mata Rantai yang Sering Diabaikan

Salah satu pelajaran besar beberapa tahun terakhir adalah bahwa krisis pangan sering tidak bermula dari sawah, melainkan dari pupuk, energi, dan logistik. IFPRI pada Maret 2025 memperingatkan bahwa harga fosfat global yang tetap tinggi menimbulkan risiko serius bagi food security, karena dampak harga pupuk terhadap hasil panen sering datang dengan jeda tetapi dapat menggerus produktivitas. FAO juga menunjukkan bahwa pada 2025 produksi pupuk global membaik, tetapi harga masih rentan terhadap biaya energi tinggi dan risiko kebijakan. Jadi, stabilitas pangan sangat dipengaruhi oleh stabilitas input. ([IFPRI](#))

Hal ini sangat relevan bagi Indonesia. Ketika harga minyak melonjak akibat konflik Timur Tengah pada Maret 2026, Reuters melaporkan bahwa Indonesia harus menyiapkan ruang fiskal lebih besar untuk subsidi energi dan berpotensi menghadapi tekanan defisit bila harga tinggi bertahan. Walaupun berita ini berkaitan langsung dengan energi, dampak tidak langsungnya pada pangan sangat jelas: distribusi antar-pulau, pengangkutan hasil pertanian, ongkos pendinginan, dan biaya operasi logistik semuanya sensitif terhadap energi. Dalam negara

kepulauan sebesar Indonesia, keterhubungan antara energi dan pangan sangat kuat. ([Reuters](#))

Selain itu, jalur laut global juga berpengaruh. IFPRI menegaskan bahwa gangguan di sekitar Selat Hormuz dapat menaikkan biaya energi dan pupuk secara global. Bagi Indonesia, ini penting bukan hanya karena impor energi, tetapi juga karena geografi nasional membuat biaya logistik domestik sudah tinggi sejak awal. Jika guncangan global menambah lapisan biaya baru, maka tekanan pangan di dalam negeri dapat membesar walaupun produksi padi sendiri sedang membaik. Di sinilah ketahanan pangan Indonesia ternyata tidak bisa dipisahkan dari geopolitik maritim global. ([IFPRI](#))

8. Iklim dan Struktur Sosial Pedesaan: Risiko Jangka Panjang

Di balik semua disrupsi perdagangan global, ada satu ancaman yang lebih lambat tetapi lebih dalam: perubahan iklim. Profil *Climate-Smart Agriculture in Indonesia* dari Bank Dunia menegaskan bahwa pertanian tetap sangat penting bagi penghidupan dan food security Indonesia; sekitar **93 persen** produsen Indonesia adalah usaha keluarga kecil, dan **64 persen** rumah tangga miskin pedesaan terlibat dalam produksi pertanian. Laporan yang sama menyebut bahwa perubahan iklim yang berlangsung perlahan akan menurunkan kesesuaian lahan untuk beberapa sistem produksi penting bagi food security, terutama **rice and maize**, sementara petani semakin rentan terhadap kenaikan suhu, pergeseran pola hujan, kekeringan, banjir, serta ledakan hama dan penyakit. ([World Bank](#))

Signifikansi geopolitiknya sangat besar. Jika pangan makin dipolitisasi di pasar global, sementara basis produksi domestik Indonesia juga tertekan iklim, maka ketahanan pangan harus dibangun di dua front sekaligus: **front perdagangan** dan **front adaptasi produksi**. Negara tidak cukup hanya menahan impor atau menambah stok bila produktivitas petani jangka panjang tergerus. Bank Dunia menekankan pentingnya investasi

pada riset, penyuluhan, benih tahan stres, efisiensi air, dan layanan informasi iklim agar smallholders dapat beradaptasi. Ini berarti ketahanan pangan Indonesia pada akhirnya sangat bergantung pada apakah negara mampu menaikkan resiliensi petani kecil, bukan hanya mengelola pasar beras nasional. ([World Bank](#))

Dalam konteks Indonesia, dimensi ini sering kurang mendapat perhatian karena politik pangan terlalu berpusat pada beras. Padahal food security yang kokoh mensyaratkan pendekatan yang lebih luas: diversifikasi produksi, penguatan pangan lokal, adaptasi iklim, dan pengurangan ketergantungan pada satu komoditas dominan. Jika tidak, maka setiap guncangan pada padi—baik karena cuaca, input, ataupun kebijakan harga—akan langsung berubah menjadi guncangan nasional. ([World Bank](#))

9. Dilema Kebijakan: Swasembada, Pasar, dan Efisiensi

Geopolitik pangan Indonesia karena itu mengandung dilema kebijakan yang nyata. Di satu sisi, larangan impor sementara, pengadaan agresif, dan cadangan besar memberi perlindungan terhadap pasar global yang tidak stabil. Di sisi lain, kebijakan seperti itu bisa menciptakan distorsi jika tidak diimbangi manajemen kualitas, distribusi, dan insentif produksi yang benar. Kasus 2025 memperlihatkan dua wajah itu sekaligus: Indonesia berhasil menghentikan impor beras konsumsi, meningkatkan stok, dan menaikkan produksi; tetapi harga tetap tinggi dan kualitas stok menjadi sorotan. Ini adalah pelajaran penting bahwa **proteksi tanpa tata kelola yang kuat dapat melindungi kedaulatan formal, tetapi belum tentu menghasilkan efisiensi substantif**. ([Reuters](#))

Di tingkat global, World Bank dan FAO juga berulang kali menunjukkan bahwa pembatasan perdagangan pangan sering dipakai untuk meredakan tekanan domestik, tetapi pada saat yang sama dapat memperburuk volatilitas global. Karena itu, Indonesia menghadapi pilihan yang tidak mudah: terlalu mengandalkan pasar dunia berisiko ketika ekspor dibatasi

negara lain; terlalu menutup diri dari pasar dunia juga berisiko bila hal itu menurunkan efisiensi, menutup sinyal harga, atau mendorong biaya fiskal tinggi. Jalan tengahnya tampaknya bukan memilih salah satu ekstrem, melainkan membangun **buffer domestik yang kuat sambil tetap menjaga keterbukaan yang selektif dan cerdas.**

Dalam konteks ini, peran Bulog, Bapanas, dan kebijakan SPHP menjadi sangat strategis. Tetapi fungsi mereka perlu didorong melampaui sekadar pembelian dan pelepasan stok. Negara perlu mengembangkan sistem peringatan dini pangan yang lebih terintegrasi, menghubungkan data produksi, harga, iklim, dan logistik secara real time, serta membedakan secara lebih tajam antara fungsi cadangan, fungsi stabilisasi harga, dan fungsi dukungan pendapatan petani. Bila semua fungsi dicampur tanpa desain yang presisi, kebijakan akan tetap mahal tetapi hasilnya tidak optimal. ([Reuters](#))

10. Arah Strategis bagi Indonesia

Bila tujuan Indonesia adalah membangun ketahanan pangan nasional yang tahan terhadap disrupsi perdagangan global, maka ada beberapa arah strategis yang tampak penting.

Pertama, Indonesia perlu mempertahankan **cadangan pangan pemerintah** yang memadai, tetapi kualitas dan rotasi stok harus menjadi prioritas yang sama pentingnya dengan volumenya. Pengalaman 2025 menunjukkan bahwa stok besar saja tidak cukup bila tidak tersalur cepat dan sesuai kebutuhan pasar. ([Reuters](#))

Kedua, Indonesia perlu menggeser fokus dari sekadar "tidak impor" menuju **produksi domestik yang lebih produktif dan lebih tahan iklim.** Itu berarti investasi besar pada irigasi, benih, riset, penyuluhan, informasi cuaca, dan pengurangan kehilangan pascapanen. Data Bank Dunia tentang dominasi smallholders dan ancaman perubahan iklim

menunjukkan bahwa ketahanan pangan Indonesia tidak akan kuat bila petani kecil tetap menjadi titik terlemah sistem. ([World Bank](#))

Ketiga, Indonesia perlu memandang geopolitik pangan sebagai isu lintas-sektor. Kebijakan pangan tidak bisa dipisahkan dari kebijakan energi, pupuk, logistik, pelayaran, dan fiskal. Kenaikan minyak dunia pada Maret 2026 memperlihatkan bagaimana cepatnya gejolak energi dapat menekan anggaran dan pada akhirnya memengaruhi biaya distribusi pangan. Karena itu, penguatan pangan nasional harus disambungkan dengan strategi energi dan logistik nasional. ([Reuters](#))

Keempat, Indonesia perlu mempertahankan keterlibatan cerdas dengan perdagangan global. Dunia mungkin makin proteksionis, tetapi pasar global tetap penting untuk mengelola kekurangan, menyeimbangkan pasokan, dan memperoleh input tertentu. Karena itu, strategi yang lebih tepat adalah **mengurangi kerentanan**, bukan membayangkan autarki total. Cadangan nasional, diversifikasi sumber impor strategis, diplomasi perdagangan, dan pemantauan pembatasan ekspor dunia harus berjalan bersamaan.

11. Penutup

Geopolitik pangan Indonesia pada dasarnya adalah persoalan tentang bagaimana negara menjamin keberlanjutan hidup warganya dalam dunia yang semakin tidak dapat diprediksi. Data 2025 memberi kabar baik: produksi beras naik tajam menjadi **34,69 juta ton**, impor beras konsumsi dapat dihentikan sepanjang 2025, dan cadangan Bulog meningkat besar. Tetapi tahun yang sama juga memberi pelajaran keras: harga beras tetap bisa tinggi, kualitas stok menjadi masalah, dan kelompok makanan masih menjadi penyumbang inflasi utama. Ini berarti ketahanan pangan Indonesia belum boleh dipahami sebagai sekadar keberhasilan panen atau keberhasilan menahan impor. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Di tengah disrupsi perdagangan global, larangan ekspor pangan di banyak negara, risiko konflik energi, dan ancaman perubahan iklim, Indonesia memerlukan paradigma ketahanan pangan yang lebih matang. Pangan harus dibaca sebagai isu produksi, distribusi, stok, harga, logistik, energi, dan iklim sekaligus. Negara yang hanya kuat di satu sisi akan tetap rapuh di sisi lain. Dalam konteks itulah, masa depan ketahanan pangan Indonesia akan ditentukan oleh seberapa jauh negara mampu mengubah pendekatan yang reaktif menjadi sistem yang **resilien, adaptif, dan terintegrasi**.

Dengan kata lain, geopolitik pangan Indonesia bukan sekadar soal memenuhi piring makan hari ini. Ia adalah soal kedaulatan negara, stabilitas sosial, dan kemampuan Indonesia bertahan dalam dunia yang makin mudah terguncang oleh perang, cuaca, energi, dan kebijakan dagang. Jika Indonesia berhasil membangun ketahanan pangan yang tidak hanya besar di atas kertas tetapi juga tangguh di lapangan, maka pangan akan menjadi fondasi kekuatan nasional. Tetapi jika negara gagal memperbaiki tata kelola, adaptasi iklim, dan integrasi kebijakannya, maka setiap disrupsi global akan terus mudah berubah menjadi kerentanan domestik. ([FAOHome](#))

Berikut **Glosarium** dan **Daftar Pustaka (APA 7)** untuk topik **“Geopolitik Pangan Indonesia: Ketahanan Nasional di Tengah Disrupsi Perdagangan Global.”**

Glosarium

1. Geopolitik pangan

Kajian tentang bagaimana pangan dipengaruhi oleh kekuasaan, konflik, perdagangan, energi, logistik, iklim, dan kebijakan antarnegara. Dalam konteks mutakhir, pangan tidak lagi dipandang hanya sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai sumber stabilitas dan kerentanan strategis.

2. Ketahanan pangan

Kondisi ketika semua orang memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi setiap saat. Dalam praktik Indonesia, ketahanan pangan terkait langsung dengan produksi, cadangan pemerintah, distribusi, stabilisasi harga, dan kemampuan menghadapi gangguan global.

3. Kedaulatan pangan

Pendekatan yang menekankan kemampuan negara menjaga kendali atas sistem pangannya sendiri, termasuk produksi, distribusi, perlindungan petani, dan pengurangan ketergantungan pada pasar luar. FAO mencatat bahwa Indonesia membingkai anggaran ketahanan pangan 2026 sebagai persoalan kedaulatan nasional.

4. Disrupsi perdagangan global

Gangguan pada arus perdagangan dunia akibat perang, pembatasan ekspor, gangguan pelayaran, proteksionisme, lonjakan energi, atau gangguan rantai pasok. Dalam urusan pangan, disrupsi seperti ini dapat menaikkan harga, memperketat pasokan, dan memicu kepanikan kebijakan.

5. Pembatasan ekspor pangan

Kebijakan negara pengekspor untuk menahan, membatasi, atau mengendalikan ekspor bahan pangan demi melindungi pasar domestik. Bank Dunia dan WTO menilai kebijakan ini memperbesar volatilitas harga dan meningkatkan ketidakpastian pasokan global.

6. Cadangan pangan pemerintah

Stok bahan pangan strategis yang dikuasai pemerintah untuk tujuan stabilisasi harga, intervensi pasar, dan penanganan krisis. Dalam konteks Indonesia, stok beras Bulog menjadi instrumen utama cadangan pangan pemerintah.

7. SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan)

Program intervensi pemerintah untuk menjaga ketersediaan dan menahan kenaikan harga pangan, terutama beras, melalui distribusi cadangan ke pasar. FAO mencatat SPHP sebagai salah satu instrumen penting kebijakan pangan Indonesia 2025–2026.

8. Bulog

Perum Bulog adalah badan usaha milik negara yang berperan penting dalam pengadaan, penyimpanan, dan distribusi beras pemerintah di Indonesia. Reuters menyoroti target pengadaan Bulog, pembesaran stok, dan perannya dalam stabilisasi pasar sepanjang 2025.

9. Swasembada pangan

Keadaan ketika kebutuhan pangan utama dipenuhi terutama dari produksi dalam negeri. Dalam kasus Indonesia, swasembada sering dikaitkan terutama dengan beras, meskipun realisasinya sangat dipengaruhi iklim, produktivitas, dan manajemen stok.

10. Inflasi pangan

Kenaikan harga pangan yang berkontribusi pada inflasi umum dan memengaruhi daya beli rumah tangga. Data BPS menunjukkan kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi penyumbang utama inflasi Indonesia pada 2025.

11. Harga pembelian pemerintah / harga pembelian gabah

Harga acuan yang ditetapkan pemerintah untuk menyerap gabah atau beras petani melalui lembaga seperti Bulog. Reuters mencatat

pemerintah Indonesia menaikkan harga pembelian gabah pada 2025 untuk memperkuat pengadaan domestik.

12. Rantai pasok pangan

Jaringan dari produksi, penyimpanan, transportasi, pengolahan, hingga distribusi pangan ke konsumen. Gangguan di salah satu mata rantai—seperti pelayaran, energi, atau pupuk—dapat mengganggu stabilitas pangan nasional.

13. Keamanan pupuk

Ketersediaan pupuk yang cukup dan terjangkau untuk mendukung produksi pertanian. IFPRI menegaskan bahwa harga pupuk global yang tinggi dapat menjadi risiko serius bagi produksi dan ketahanan pangan.

14. Ketahanan logistik pangan

Kemampuan sistem distribusi untuk menyalurkan pangan secara tepat waktu dan efisien, terutama di negara kepulauan seperti Indonesia. Dalam konteks Indonesia, biaya energi dan distribusi antarpulau sangat memengaruhi harga pangan akhir.

15. Pertanian cerdas-iklim (climate-smart agriculture)

Pendekatan pertanian yang bertujuan meningkatkan produktivitas, memperkuat adaptasi, dan menurunkan kerentanan terhadap perubahan iklim. Bank Dunia menilai pendekatan ini penting bagi Indonesia karena dominasi petani kecil dan meningkatnya risiko iklim pada padi serta jagung.

16. Petani kecil (smallholders)

Produsen pertanian berskala kecil yang menjadi tulang punggung produksi pangan di banyak negara berkembang. Bank Dunia mencatat sebagian besar produsen pertanian Indonesia adalah usaha keluarga kecil, sehingga ketahanan pangan nasional sangat bergantung pada ketahanan mereka.

Daftar Pustaka (APA 7)

Badan Pusat Statistik. (2025, February 3). *Nilai tukar petani (NTP) Januari 2025 sebesar 123,68 atau naik 0,73 persen; harga beras premium di penggilingan naik 0,82 persen.*

Badan Pusat Statistik. (2025, October 1). *Inflasi September 2025 terutama dipengaruhi oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau.*

Badan Pusat Statistik. (2026, January 2). *Perkembangan indeks harga konsumen, Desember 2025.*

Badan Pusat Statistik. (2026, February 2). *Luas panen padi pada tahun 2025 mencapai sekitar 11,32 juta hektare dengan produksi padi sebanyak 60,21 juta ton gabah kering giling (GKG).*

Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2025, September). *Agri-food policy highlights: Indonesia.*

International Food Policy Research Institute. (2025, March 12). *High global phosphate prices pose potential food security risks.*

International Food Policy Research Institute. (2026, March 4). *The Iran war's potential food security impacts.*

Reuters. (2025, January 6). *Indonesia's Bulog aims to procure 3 million tons of domestic rice in 2025.*

Reuters. (2025, September 23). *High rice prices jolt Indonesia consumers despite good crop, hefty stocks.*

Reuters. (2026, March 9). *Indonesia will absorb shock from soaring oil prices using state budget.*

Rudy C Tarumingkeng: Geopolitik Pangan Indonesia - Ketahanan Nasional di Tengah Disrupsi Perdagangan Global

The World Bank. (2025, February 14). *Food security update (Issue 113)*.

The World Bank. (2025, December 19). *Food security update (Issue 120)*.

The World Bank. (2021). *Climate-smart agriculture in Indonesia*. World Bank Group.

World Trade Organization. (2025, September 26). *Agriculture negotiations: Members review export restrictions and food security concerns*.

Copilot for this article - Chatgpt 5.2 Thinking. Access date: 14 Maret 2026
Prompting on Writer's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69acf5b9-8798-839d-83f0-cffa92d7b98c>